

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Konflik

Pitana dan Gayatri (2005:20) dalam buku *Sosiologi Pariwisata* menyatakan bahwa teori konflik adalah dominasi dan sub ordinasi yang menjadi pokok bahasan penting karena mengandung arti bahwa aturan, norma dan nilai yang harus dianut oleh masyarakat sesungguhnya merupakan nilai, norma atau aturan dari kelompok dominan yang memaksakan kepada kelompok sub ordinat. Melalui pemaksaan nilai dan aturaan tersebut, kelompok dominan mempertahankan struktur sosial yang menguntungkan kelompoknya.

2.1.1 Konflik Pengelolaan

Menurut Sumardjo (2010) Konflik pengelolaan adalah suatu bentuk pertentangan yang terjadi antara *stakeholder* yang sama-sama ikut terlibat dalam pengelolaan suatu wilayah perencanaan. Sedangkan pengertian dari pengelolaan adalah proses pengkoordinasian dan mengintegrasikan semua sumber daya baik manusia maupun teknikal untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi (Murniati, 2009). Pengertian lain tentang pengelolaan adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya (Harsoyo,2008). Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan suatu konflik pengelolaan dapat terjadi jika terdapat banyak *stakeholder* yang terlibat dengan tujuan yang berbeda-beda.

Pada penelitian ini pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan berdasarkan permasalahan yang ada di Wisata Kuliner Payung Kota Batu sesuai dengan masing-masing *stakeholder* yang terlibat. Perbedaan arahan pengelolaan inilah yang menjadi penyebab munculnya konflik pengelolaan di Wisata Kuliner Payung.

2.1.2 Faktor Penyebab Konflik Pengelolaan

Sumardjo, 2010 menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik pengelolaan terdiri atas:

- a. Perbedaan fungsi dan wewenang *stakeholder*
- b. Perbedaan jenis kelompok konflik
- c. Perbedaan usulan alternatif pengelolaan.

Konflik sebagai akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. Pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi (Hidayat,2002:124).

Terdapat 3 faktor penyebab konflik menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin. ketiga faktor tersebut meliputi:

1. Determinan tingkat aspirasi. Aspirasi bangkit dan kemudian menghasilkan konflik karena salah satu dari dua alasan, yaitu masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki objek tersebut,
2. Determinan persepsi tentang aspirasi pihak lain. Konflik dapat terjadi ketika salah satu pihak benar-benar merasa puas dengan posisinya dan menganggap pihak lain mengancam posisinya tersebut. Konflik juga dapat timbul ketika suatu keputusan mengenai masa depan harus diambil dan pihaknya maupun pihak lain mengambil posisi yang berbeda mengenai arah yang harus diambil.
3. Tidak adanya alternatif yang dapat diterima semua pihak. Suatu pihak juga harus memiliki persepsi bahwa aspirasi kedua belah pihak tidak kompatibel satu sama lain. Pada suatu saat tampaknya tidak ada alternatif yang mungkin akan berhasil dicapai oleh kedua belah pihak, atau masing-masing pihak berusaha untuk mencapai tujuannya meskipun harus dengan membebankan kerugiannya pada pihak lain.

Teori penyebab potensi konflik pada penelitian ini digunakan dalam penentuan variabel tujuan pertama yaitu mengidentifikasi konflik-konflik yang terjadi serta alternatif pengelolaan dari masing-masing-masing *stakeholder* pada pengelolaan Wisata Kuliner payung. Variabel yang digunakan adalah potensi konflik dengan sub variabel yaitu perbedaan kepentingan, perbedaan fungsi *stakeholder*, dan perbedaan alternatif.

2.2 Stakeholder

2.2.1 Pengertian Stakeholder

Stakeholder adalah sekelompok orang (Individu organisasi, asosiasi atau bagian terkecil lainnya) yang memiliki keterikatan didalam pengembangan wisata serta memberi kontribusi. Stakeholder merupakan individu-individu atau kelompok-kelompok yang ahli dan mempunyai andil di dalam suatu kebijakan (Dunn, 2003).

2.2.2 Kategori Stakeholder

Kategori *stakeholder* dapat dikelompokkan berdasarkan kepentingan dan pengaruh dari setiap *stakeholder*. Kepentingan (*importance*) menurut Reed et al (2009) adalah merujuk pada kebutuhan *stakeholder* dalam pencapaian *output* atau tujuan. Sedangkan pengaruh menurut Reed et al (2009) adalah merujuk pada kekuatan yang dimiliki *stakeholder* untuk mengontrol proses dan hasil keputusan. Menurut Al Hakim (2014) tingkat kepentingan terdiri dari:

1. Keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan suatu wilayah. Keterlibatan *stakeholder* yang dimaksud adalah suatu proses perkelanjutan *stakeholder* dalam mengkaji, merencanakan dan melaksanakan rencana pengelolaan.
2. Ketergantungan *stakeholder* dalam pengelolaan suatu wilayah. Ketergantungan *stakeholder* yang dimaksud adalah hubungan sosial dari setiap *stakeholder* terhadap kebutuhan adanya pengembangan suatu wilayah.
3. Peran masing-masing *stakeholder* terhadap pengelolaan suatu wilayah. Peran *stakeholder* yang dimaksud adalah tugas dari setiap *stakeholder* terhadap keberhasilan pengelolaan suatu wilayah.
4. Manfaat yang diperoleh *stakeholder* dari pengelolaan suatu wilayah. Manfaat yang dimaksud adalah Keuntungan yang diterima *stakeholder* dengan adanya suatu lokasi perencanaan.
5. Kepentingan *stakeholder* terhadap pengelolaan suatu wilayah. Kepentingan yang dimaksud adalah relevansi atau dasar dari keterkaitan *stakeholder* terlibat dalam pengelolaan suatu wilayah.

Sedangkan, tingkat pengaruh terdiri dari:

1. Instrumen dan sumber kekuatan (*power*) yang dimiliki masing-masing *stakeholder*. Sumber kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan atau kekuasaan *stakeholder* untuk mempengaruhi kebijakan atau kelembagaan yang berpangkal pada kontrol keputusan dengan efek positif atau negatif.

2. Posisi derajat *stakeholder* dalam pembuatan keputusan. Posisi derajat *stakeholder* yang dimaksud adalah tingkatan dimana *stakeholder* dapat membujuk atau memaksa orang lain untuk membuat keputusan, serta mengikuti rangkaian tindakan tertentu.
3. Dukungan SDM terhadap pengelolaan suatu wilayah. Dukungan SDM yang dimaksud adalah potensi yang dimiliki setiap *stakeholder* untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan kelembagaan atau karakteristik tertentu yang spesifik sesuai dengan konteks dan lokasinya, seperti pengetahuan yang dimiliki *stakeholder*.
4. Kemampuan pendanaan dan manajemen terhadap pengelolaan suatu wilayah. kemampuan pendanaan yang dimaksud adalah posisi *stakeholder* dalam mendukung pendanaan dan manajemen pengelolaan Wisata Kuliner Payung
5. Interaksi dengan *stakeholder* yang lain. Interaksi dengan *stakeholder* lain dilihat dari hubungan interaktif dengan *stakeholder* lain yang berkaitan dengan Wisata Kuliner Payung.

Berdasarkan pengaruh (power) dan kepentingan (interest) yang dimiliki oleh setiap stakeholder maka stakeholder dapat dikategorikan menjadi empat jenis yaitu (Reed et al, 2009):

1. Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest) yang tinggi tetapi memiliki pengaruh (power) yang rendah diklasifikasi sebagai subyek (subject).
2. Stakeholders dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (power) yang tinggi diklasifikasikan sebagai Pemain Kunci (Key Players).
3. Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (power) yang rendah diklasifikasikan sebagai pengikut lain (Crowd) atau disebut juga dengan penonton (*spectator*)
4. Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest) yang rendah tetapi memiliki pengaruh (power) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung (Contest setters) disebut juga dengan aktor (*actor*).

Kategori *stakeholder* menurut Reed et al (2009) dijadikan sebagai acuan pemetaan posisi dari setiap *stakeholder* yang keterlibatan pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Teori kategori *stakeholder* pada penelitian ini digunakan dalam penentuan variabel tujuan kedua yaitu mengidentifikasi dan memetakan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Kuliner payung. Terdapat dua variabel yang digunakan yaitu tingkat kepentingan dengan sub variabel yaitu keterlibatan stakeholder, ketergantungan *stakeholder*, peran masing-masing *stakeholder*,

manfaat yang diperoleh *stakeholder*, kepentingan *stakeholder*. Variabel yang kedua adalah tingkat pengaruh dengan sub variabel instrumen dan sumber kekuatan (*power*), posisi serajat *stakeholder* dalam pembuatan keputusan, dukungan sumber daya manusia, kemampuan pendanaan dan manajemen, dan interaksi dengan *stakeholder* yang lain.

2.3 Tinjauan Kepariwisata

Pariwisata merupakan perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat mereka biasanya hidup, bekerja dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. Sedangkan kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan. Kepariwisataan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata. Hal tersebut dilakukan melalui pemeliharaan kebudayaan, sejarah dan taraf perkembangan ekonomi dan suatu tempat tujuan wisata yang masuk dalam pendapatan untuk wisatawan akibatnya akan menjadikan pengalaman yang unik untuk tempat wisata. Pada waktu yang sama terdapat nilai-nilai yang membawa serta dalam perkembangan kepariwisataan sesuai dengan panduan, maka perkembangan pariwisata dapat memperbesar keuntungan sambil memperkecil masalah-masalah yang ada (Marpaung, 2002).

2.3.1 Wisata Kuliner

Karakteristik dan keunikan suatu daya tarik wisata adalah ciri khas yang dimiliki oleh sebuah objek wisata yang menjadi tujuan utama wisatawan untuk menikmatinya dan sebagai pembeda dengan onyek wisata yang lainnya. Saat ini daya tarik wisata mulai berkembang salah satunya adalah wisata kuliner. Berdasarkan Asosiasi Pariwisata Kuliner Internasional (*International Culinary Tourism Association /ICTA*) Wisata kuliner adalah kegiatan makan dan minum yang unik dilakukan oleh setiap pelancong yang berwisata. Sedangkan menurut Minta Harsana (2008), wisata kuliner adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati makanan atau minuman. Wisata kuliner adalah perjalanan wisata yang berkaitan dengan hal masak memasak. Menurut Suryadana (2009), wisata kuliner adalah wisata yang menyediakan

berbagai fasilitas pelayanan dan aktivitas kuliner yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang dibangun untuk rekreasi, relaksasi, pendidikan dan kesehatan.

Daya tarik utama wisata kuliner adalah produk makanan. Produk makanan merupakan hasil proses pengolahan bahan mentah menjadi makanan siap dihidangkan melalui kegiatan memasak. Lebih lanjut Davis dan Stone (1994:44) mengemukakan bahwa karakteristik fisik dari produk makanan dan minuman antara lain kualitas, penyajian, susunan menu, porsi makanan, siklus hidup produk, dekorasi ruang maupun pengaturan meja. Sebagian makanan dan minuman disajikan dan disediakan oleh suatu restoran.

Menurut Suryadana (2009) menyebutkan bahwa terdapat 12 daya tarik wisata kuliner, yaitu sebagai berikut.

1. Keragaman aktivitas kuliner
2. Makanan khas
3. Lokasi yang nyaman dan bersih
4. Desain ruangan (*venue*) yang unik dan menarik
5. Pelayanan yang baik
6. Pasar yang *competitive*
7. Harga dan proporsi nilai
8. Peluang bersosialisasi
9. Interaksi budaya dengan kuliner
10. Suasana Kekeluargaan
11. Lingkungan yang menarik
12. Produk tradisional, nasional dan internasional

Berdasarkan penjelasan terkait daya tarik wisata kuliner dapat disimpulkan bahwa produk makanan yang terdiri dari makanan dan minuman yang enak serta mempunyai keunikan dan penyajian yang khas merupakan tujuan dari perjalanan wisata kuliner. Wisata ini tentu saja sangat diminati oleh wisatawan. Pada mulanya makanan dan minuman hanyalah sebagai pelengkap dalam kegiatan pariwisata, namun pada perkembangannya justru makanan dan minuman itulah menjadi tujuan utama perjalanan seseorang.

Pengembangan wisata kuliner tidak terlepas dari program pengembangan jenis pariwisata lain seperti wisata alam dan budaya, karena pada dasarnya makanan merupakan salah satu aspek dalam kebudayaan. Hal itu disebabkan pengembangan pariwisata tidak dapat terlepas dari masalah makanan dan bahkan makanan dapat dijadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan dapat dijadikan cinderamata (Minta Harsana, 2008).

Berdasarkan pengertian wisata kuliner tersebut, konsep wisata kuliner yang dibahas pada penelitian ini adalah kondisi dimana pengelolaan wisata yang memiliki spesifikasi kegiatan harus memiliki kebijakan pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan wisata pada umumnya.

2.3.2 Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata sangat dibutuhkan pada suatu daerah tujuan pariwisata. Pengelolaan pariwisata memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan.
2. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
3. Meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasioanal dan internasional

Menurut Oka A. Yoeti (2002) pengembangan suatu lokasi wisata meliputi:

1. Sebagian besar sumber daya fisik atau komponen produk wisata
2. Analisis pengunjung potensial, kebijakan harga dan destinasi saingan
3. Aspek lingkungan, budaya dan sosial

Menurut Gamal Suwanto (2004) pengelolaan pariwisata sering dikaitkan dengan adanya Sapta Kebijakan Pengembangan Pariwisata oleh pemerintah yaitu sebagai berikut.

1. Promosi

Promosi pariwisata harus dilaksanakan secara selaras dan terpadu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu aspek penting karena menyangkut pengembangan lintas sektoral.

3. Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata yang dimaksud adalah untuk meningkatkan peran serta daerah dan swasta dalam pengembangan pariwisata, memperbesar dampak positif pembangunan, dan mempermudah pengendalian terhadap dampak lingkungan.

4. Produk Wisata

Upaya untuk dapat menampilkan produk wisata yang bervariasi dan mempunyai kualitas daya saing yang tinggi.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar pengembangan pariwisata.

6. Kampanye Nasional Sadar Wisata

Kampanye nasional sadar wisata pada dasarnya adalah upaya upaya memasyarakatkan Sapta Pesona yang turut menegakkan disiplin nasional dan jati diri bangsa Indonesia melalui kegiatan kepariwisataan.

Berdasarkan teori pengelolaan wisata maka arahan pengelolaan Wisata Kuliner Payung harus diarahkan sesuai dengan teori yang ada. Permasalahan yang ada pada Wisata Kuliner Payung berdampak pada pengelolaan dan perkembangan Wisata Kuliner Payung. Apabila pengelolaan Wisata Kuliner Payung berjalan dengan baik tanpa ada *stakeholder* yang dirugikan maka akan berdampak baik penyelesaian konflik pengelolaan *stakeholder*.

2.4 Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa kawasan hutan yang digunakan sebagai Wisata Kuliner Payung adalah hutan penyangga. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan penyangga adalah kawasan hutan yang menjadi peralihan antara hutan lindung dan hutan produksi. Berdasarkan pengertian tersebut kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di kawasan hutan adalah kegiatan ekonomi dan kegiatan konservasi. Berikut penjelasan terkait teori konservasi.

2.4.1 Pengertian Konservasi

Konservasi memiliki arti sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman pada asas pelestarian. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan).
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan.
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjaminnya kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukkan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi, polusi dan penurunan potensi sumber daya alam hayati.

2.4.2 Formulasi Alternatif Pengelolaan Perubahan Fungsi Hutan

Al Hakim (2014) menyatakan bahwa terdapat empat kriteria yang menjadi dasar formulasi alternatif pengelolaan perubahan fungsi hutan. Empat kriteria tersebut terdiri dari:

1. Ekonomi

Kriteria ekonomi mengkaji terkait kondisi perekonomian masyarakat yang berada di wilayah pengembang, apakah masyarakat tersebut menerima dampak positif dari pengembangan fungsi hutan sebagai kegiatan perekonomian.

2. Lingkungan

Kriteria lingkungan terkait mengkaji kondisi kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kegiatan Wisata.

3. Sosial

Kriteria sosial mengkaji terkait kondisi sosial masyarakat, pemerintah dan swasta yang terlibat dengan pengelolaan wilayah.

4. Kelembagaan

Kriteria kelembagaan mengkaji terkait kondisi peraturan dan kelembagaan pengelolaan lokasi pengembangan.

Pada penelitian ini teori dari Al Hakim (2014) digunakan sebagai dasar penentuan kriteria pemilihan alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Keempat aspek formulasi alternatif pengelolaan perubahan fungsi hutan sesuai dengan kondisi di Wisata Kuliner Payung yaitu awalnya adalah hutan yang dikembangkan sebagai kegiatan lokasi pembukaan wisata kuliner.

2.5 Teori Pengambilan Keputusan

Menurut Supranto (1991) keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dalam rencana semula. Menurut Iqbal Hasan (2002) Pengambilan keputusan adalah satu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternative yang dihadapi dan mengambil yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

2.5.1 Fungsi Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara instiusional maupun orgasional.
2. Suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkutan paut dengan hari depan, masa yang akan datang yang efek dan pengaruh berlangsung sangat lama.

2.5.2 Faktor-faktor Pengambilan Keputusan

Menurut Basyid (2006) dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa faktor atau hal-hal yang mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut :

1. Posisi atau kedudukan

Dalam rangka pengambilan keputusan, posisi kedudukan seseorang dapat dilihat dari letak posisi dan tingkatan posisi.

2. Masalah

Masalah adalah hal yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan daripada yang diharapkan, direncanakan atau dikehendaki.

3. Kondisi

Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat atau kemampuan kita.

4. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai baik tujuan perorangan, tujuan unit (kesatuan), tujuan organisasi yang pada umumnya sudah ditentukan.

2.5.3 Dasar-dasar Pengambilan Keputusan

Dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan bermacam-macam tergantung pada permasalahannya. Oleh Hamburg (1976) disebutkan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Instuisi

Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas instuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh.

2. Pengalaman

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu dapat memperhitungkan untuk ruginya baik buruknya keputusan yang diambil.

3. Fakta

Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik.

4. Wewenang

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap

5. Rasional

Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan yang diinginkan.

Teori pengambilan keputusan digunakan sebagai landasan teori dalam proses analisis pengambilan keputusan pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan banyak teori agar diperoleh alternatif kebijakan yang sesuai dengan kepentingan semua pihak yang terlibat.

2.6 Analisis Delphi

Analisis delphi adalah metode yang banyak digunakan dan diterima untuk mengumpulkan data dari responden dalam domain penelitian mereka. Analisis delphi dirancang sebagai proses komunikasi kelompok yang bertujuan untuk mencapai konvergensi pendapat tentang isu-isu nyata. Proses analisis delphi telah digunakan di berbagai bidang studi seperti perencanaan program, penilaian assesment, penentuan kebijakan, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengembangkan berbagai alternatif, menjelajahi atau mengekspos yang mendasari asumsi, serta berkorelasi penilaian pada suatu topik yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Teknik delphi digunakan untuk pembangunan konsensus dengan menggunakan serangkaian kuesioner menggunakan beberapa iterasi untuk mengumpulkan data panel dari subyek yang dipilih. Metode *delphi* klasik digunakan ketika data dikumpulkan melalui para pakar secara terpisah melalui sejumlah konsultasi, kemudian data tersebut akan diaplikasikan dalam siklus *delphi* dan level konsensus mencapai 60% (Eadie, R et al, 2008).

Tujuan dari analisis delphi untuk mengembangkan suatu perkiraan konsensus masa depan dengan meminta pendapat para ahli dan pada saat yang sama menghilangkan masalah sering terjadi yaitu komunikasi tatap muka. Sedangkan menurut Delbecq, Van de Ven dan Gustafson analisis delphi digunakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut.

1. Untuk menentukan atau mengembangkan berbagai alternatif program yang mungkin

2. Untuk mengekspos asumsi yang mendasari atau informasi yang mengarah ke penilaian yang berbeda
3. Untuk mencari informasi yang dapat menghasilkan konsensus sebagai bagian dari kelompok responden
4. Untuk menghubungkan penilaian informasi pada topik yang mencakup berbagai disiplin
5. Untuk mendidik kelompok responden mengenai aspek beragam dan saling terkait dari topik.

Pada penelitian ini analisis delphi digunakan untuk menentukan sub kriteria penentuan alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Responden yang digunakan dalam analisis delphi adalah pakar yang memahami permasalahan yang terjadi pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Level konsensus yang digunakan pada penelitian sesuai dengan teori (Eadie, R et al, 2008) yaitu setiap sub kriteria mencapai level konsensus 60%. Teori terkait analisis delphi sesuai dengan tujuan ketiga dari penelitian ini yaitu menentukan sub kriteria yang digunakan pada penilaian alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung.

2.7 Analisis *Multi Criteria Decision Making*

Pendekatan MCDM sudah banyak digunakan dan dikembangkan serta diakomodasi bagi berbagai kriteria yang dihadapi namun relevan dalam pengambilan keputusan tanpa perlu konversi ke unit-unit pengukuran dan proses normalisasi. Menurut Subandar (2002) dalam Febriani (2008) mengelompokkan MCDM ke dalam dua kategori yaitu *multiple atribut decision making* (MADM) dan *multiple objective decision making* (MODM). Istilah MADM dipakai apabila pilihan alternatif berukuran kecil (5-20 alternatif) sedangkan MODM dipakai apabila berhadapan dengan pilihan alternatif yang lebih besar dari MADM. MADM sering dipertukarkan dengan MCDM serta sering juga disebut dengan *multiple criteria analysis* (MCA) atau *multi criteria evaluation* (MCE).

Bidang analisis *multi criteria* memerlukan sejumlah pendekatan untuk menghitung kriteria yang banyak guna membentuk struktur pendukung proses pengambilan keputusan. Penggunaan teknik MCDM pada beberapa bidang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Teknik MCDM mempunyai kemampuan dalam menangani jenis data yang bervariasi (kuantitatif, kualitatif dan campuran) dan pengukuran yang intangibel.
2. Teknik MCDM dapat mengakomodasi perbedaan yang diinginkan dalam penentuan kriteria

3. Skema bobot yang bervariasi untuk suatu prioritas atau pandangan dari stakeholder yang berbeda dapat diterapkan dalam MCDM
4. Tidak membutuhkan penentuan nilai ambang seperti pada operasi *overlay* sehingga kehilangan informasi yang dihasilkan, tidak terjadi akibat penurunan skala dari variabel yang *continue* pada skala nominal
5. Prosedur analisis atau agregasi dalam teknik MCDM relatif sederhana

Menurut MCDM tidak selalu memberikan solusi spesifik, selanjutnya solusi MCDM diklasifikasi sebagai berikut.

1. Solusi ideal, kriteria atau atribut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kriteria yang nilainya akan dimaksimumkan (kategori nilai keuntungan), dan kriteria yang nilainya akan diminumkan (kategori kriteria biaya). Solusi ideal akan memaksimumkan semua kriteria keuntungan dan meminimumkan semua kriteria biaya.
2. Solusi *non-dominated*, solusi ini sering juga dikenal dengan nama solusi pareto-optimal. Solusi feasible MCDM dikatakan *non-dominated* jika tidak ada solusi feasible yang lain akan menghasilkan perbaikan terhadap suatu atribut tanpa menyebabkan degenerasi pada atribut lainnya.
3. Solusi yang memuaskan, solusi yang memuaskan adalah himpunan bagian dari solusi-solusi feasible dimana setiap alternatif melampaui semua kriteria yang diharapkan.
4. Solusi yang lebih disukai, solusi yang disukai adalah solusi *non-dominated* yang paling banyak memuaskan pengambil keputusan.

Secara umum, struktur bobot suatu alternatif dengan kriteria yang harus diambil disusun berdasarkan matrik. Teknik yang bertujuan mengakomodasi proses seleksi yang melibatkan kriteria (*multi objective*) dalam mengkalkulasi pemrasaran diantara kriteria konflik yang terjadi. Bidang analisis ini memerlukan sejumlah pendekatan dengan menghitung banyak kriteria untuk membentuk struktur yang mendukung proses pengambilan keputusan. Beberapa software yang dirancang untuk mendukung analisis ini diantaranya adalah *Sanna7*.

Menurut Subandar (2002) dalam Febriani (2008) secara umum pelaksanaan MCDM dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Penentuan/penetapan alternatif
2. Penentuan nilai/skor masing-masing kriteria
3. Prioritas pembuatan keputusan (*decision makin prefernces*)

Alternatif yang ditetapkan merupakan pilihan-pilihan yang relevan. Kemudian dari alternatif yang telah ditetapkan, disusun kriteria-kriteria yang mempengaruhi alternatif

pilihan. Masing-masing kriteria yang telah disusun diberi nilai. Nilai dapat berupa kuantitatif, kualitatif maupun campuran. Proses normalisasi nilai dari masing-masing kriteria dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur standar linier dan non-linier. Sedangkan prioritas pembuatan keputusan dapat diformulasikan dari kriteria yang diambil, dengan membentuk nilai sendiri (maksimum atau minimum) atau sesuai dengan tingkat keinginan. Proses pemberian nilai menggunakan fungsi agregasi tunggal atau ganda yang menghasilkan satu atau beberapa buah solusi. Analisis *Multi Criteria Decision Making* menggunakan hasil pembobotan terhadap kriteria dan sub kriteria yang sudah ditentukan. Pembobotan dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari responden yang ekspert di bidang yang sesuai. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berjudul formulasi Alternatif Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Energi Panas Bumi di Kamojang, Jawa Barat dengan Analisis *Multi Criteria Decision Making* (MCDM), penelitian tersebut menggunakan responden ekspert dari hasil analisis *stakeholder* yaitu *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh tertinggi yaitu PT. Pertamina Geothermal Energi. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu penerapan pemilihan supplier bahan baku ready mix berdasarkan integrasi metode ahp dan topsis (studi kasus pada PT. Merak Jaya Beton, Malang), pada penelitian tersebut diketahui bahwa responden ekspert yang dipilih adalah 3 responden yang memiliki fungsi dan wewenang tertinggi di dalam PT. Merak Jaya Beton. Kedua penelitian tersebut digunakan peneliti untuk menentukan jumlah responden ekspert yang akan melakukan penilaian pada analisis *Multi Criteria Decision Making* menggunakan metode TOPSIS.

Analisis *Multi Criteria Decision Making* pada penelitian ini menggunakan 9 alternatif yang diperoleh dari hasil analisis konflik. Penelitian ini menggunakan 4 kriteria yaitu ekonomi, lingkungan, sosial dan kelembagaan, masing-masing kriteria memiliki 5 sub kriteria. Setiap kriteria dan sub kriteria memiliki skema bobot yang bervariasi untuk mendukung penentuan prioritas atau pandangan dari *stakeholder*. Kemudian untuk *stakeholder ekspert* yang dipilih untuk melakukan penilai adalah *stakeholder* yang masuk dalam kategori *player* yang merupakan hasil dari analisis *stakeholder*.

2.8 TOPSIS (Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution)

Metode TOPSIS (Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution) adalah metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan multikriteria. TOPSIS memberikan sebuah solusi dari sejumlah alternatif yang mungkin dengan cara membandingkan setiap alternatif dengan alternatif terbaik dan alternatif terburuk yang ada

diantara alternatif-alternatif masalah. Metode TOPSIS menggunakan jarak untuk melakukan perbandingan tersebut. TOPSIS telah digunakan dalam banyak aplikasi.

TOPSIS mengasumsi bahwa setiap kriteria akan memaksimalkan ataupun diminimalkan. Maka dari itu nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dari setiap kriteria ditentukan dan setiap alternatif dipertimbangkan dari informasi tersebut. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi ideal negatif terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. Namun, solusi ideal positif jarang dicapai ketika menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Maka asumsi dasar dari TOPSIS adalah ketika solusi ideal positif tidak dapat dicapai, pembuat keputusan akan mencari solusi yang sedekat mungkin dengan solusi ideal positif. TOPSIS memberikan solusi ideal positif yang absolut. Dalam metode TOPSIS klasik, nilai bobot dari setiap kriteria telah diketahui dengan jelas. Setiap bobot dari setiap kriteria ditentukan berdasarkan tingkat kepentingannya menurut pengambilan keputusan.

TOPSIS berdasarkan intuisi yaitu alternatif pilihan merupakan alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Namun, alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif, tidak harus mempunyai jarak terbesar dari solusi ideal negatif. Maka dari itu, TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif secara bersamaan. Solusi optimal dalam metode TOPSIS didapat dengan menentukan kedekatan relatif suatu alternatif terhadap solusi ideal positif. TOPSIS akan meranking alternatif berdasarkan prioritas nilai kedekatan relatif suatu alternatif terhadap solusi ideal positif. Alternatif alternatif yang telah diranking kemudian dijadikan sebagai referensi bagi pengambil keputusan untuk memilih solusi terbaik yang diinginkan. Metode ini banyak digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan.

Pada penelitian ini metode TOPSIS digunakan karena proses penentuan prioritas alternatif kebijakan mempertimbangkan 4 kriteria dengan 20 sub kriteria sehingga dapat dikategorikan sebagai permasalahan multikriteria. Melalui metode TOPSIS, urutan prioritas alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung ditentukan berdasarkan kedekatan relatif suatu alternatif terhadap solusi ideal positif. Penggunaan metode TOPSIS pada penelitian ini

sesuai dengan tujuan penelitian yang keempat yaitu menentukan prioritas alternatif pengelolaan yang sesuai dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pemilihan alternatif pengelolaan untuk pengelolaan suatu wilayah cukup banyak dilakukan. Sebagian besar studi yang sudah dilakukan membahas mengenai konflik, *stakeholder* dan alternatif pengelolaan. Berdasarkan teori, variabel dan metode terdahulu dapat disimpulkan penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian dan Tahun	Tujuan Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Manfaat Penelitian	Perbedaan Studi
Ananto, Arisandi, Sarwanto, Hadi, Minto	Sistem Pengambilan Keputusan Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Arung Jeram Bosamba di Kabupaten Bondowoso	- Mengetahui dan menganalisis sistem pengambilan keputusan dalam mengembangkan potensi wisata arung jeram Bosamba	- Potensi pariwisata - Stakeholder	- Model Interaktif Miles dan Huberman	- Pengelolaan objek wisata arung jeram Bosamba diserahkan kepada pihak swasta melalui proses yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, DPRD Kabupaten Bondowoso, dan pihak swasta selaku pengelola objek wisata antara	Penelitian ini digunakan sebagai referensi tinjau pustaka pengambilan keputusan	- Pada penelitian ini tidak dilakukan proses pengambilan keputusan dan alternatif keputusan - Output dari penelitian ini adalah pengambil keputusan
Sumardjo	Pengembangan Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Sekitar Tambang dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi	- Identifikasi potensi sumberdaya lingkungan pertanian di wilayah tambang (khususnya terkait dengan pangan, energi dan kemiskinan - Identifikasi potensi konflik, jenis-jenis konflik dan dampak konflik di sekitar tambang - Analisis tipologi konflik,	- Potensi konflik	- Analisis Tipologi Konflik	- Perumusan alternatif model pengelolaan konflik di sekitar tambang yang ramah lingkungan pada masyarakat tambang rakyat adalah penguatan usahatani dan sosialisasi substansi norma terkait dengan usaha penambangan, seperti pengelolaan lingkungan. - Strategi dan kebijakan pengelolaan konflik berbasis lingkungan serta berorientasi pengembangan alternatif ketahanan pangan dan energi:	Penelitian ini digunakan sebagai referensi penentuan variabel analisis konflik	- Pada penelitian ini tidak dilakukan analisis tipologi konflik namun hanya dilakukan eksplorasi pendapat <i>stakeholder</i> konflik dan permasalahan yang ada.

Nama	Judul Penelitian dan Tahun	Tujuan Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Manfaat Penelitian	Perbedaan Studi
		mencakup potensi konflik, jenis dan dampak konflik - Perumusan alternatif model pengelolaan konflik disekitar tambang yang ramah lingkungan.					
Kadir W, Abd, Awang, San Afri, Purwanto, Ris Hadi, Poedjirahajoe, Erny	Analisis <i>Stakeholder</i> Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung BuluSaraung, Provinsi Sulawesi Selatan	- Mengidentifikasi pihak terkait (<i>stakeholder</i>) dalam pengelolaan TN Babul - Mendapatkan penjelasan mengenai kepentingan (<i>interest</i>) dan pengaruh (<i>power</i>) setiap (<i>stakeholder</i>) dalam pengelolaan TN Babul - Merumuskan peran para pihak terkait (<i>stakeholder</i>) dalam mengakomodir kepentingan masyarakat	- Kepentingan - Pengaruh	- Analisis Deskriptif Kualitatif - Analisis <i>Stakeholder</i>	- <i>Stakeholder</i> primer dalam pengelolaan TN Babul terdiri dari Balai TN Babul, masyarakat sekitar TN Babul, PDAM Maros, Disparbud Maros, dan Lembaga Pengelola Air Desa. Sedangkan <i>stakeholder</i> sekunder terdiri dari Dishutbun Maros, Dinas Pertanian Maros, BP2KP Maros, BPN Maros, PNPM Mandiri, LSM dan Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian. - Kepentingan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan TN Babul terdiri dari kepentingan untuk menjaga kelestarian kawasan dan kepentingan untuk memperoleh manfaat atas keberadaan Taman Nasional seperti pemanfaatan jasa air untuk kebutuhan sehari-hari dan wisata, serta sebagai tempat untuk berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara keberadaan <i>stakeholder</i> tersebut dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif	Penelitian ini digunakan sebagai referensi dalam tahap analisis <i>Stakeholder</i> dan pemetaan kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i>	- Penelitian ini dilakukan dengan tujuan hanya untuk mengetahui posisi para <i>stakeholder</i> dan tidak menggunakan analisis yang berkaitan dengan pengambilan keputusan

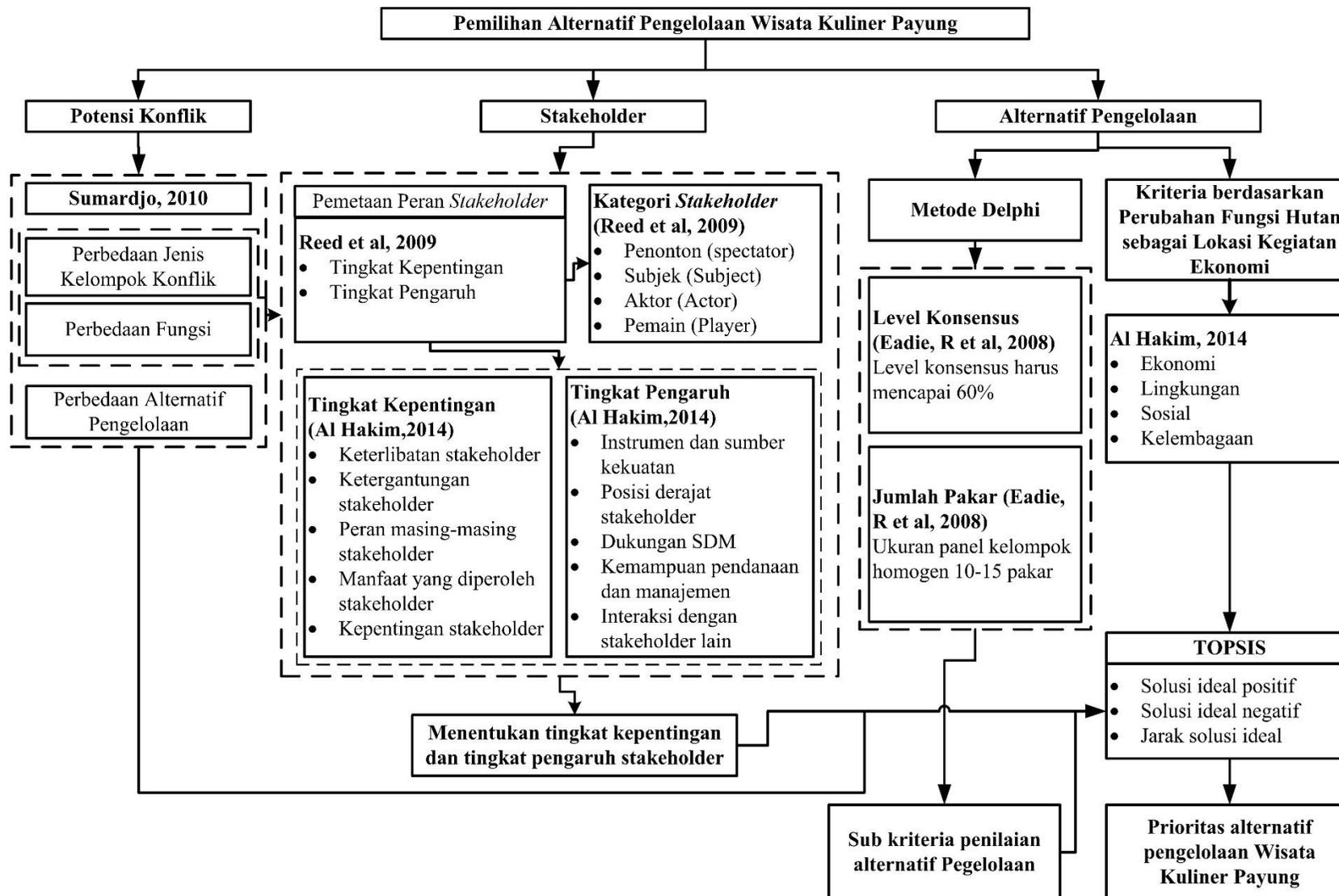
Nama	Judul Penelitian dan Tahun	Tujuan Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Manfaat Penelitian	Perbedaan Studi
		terkait peremajaan kemiri dalam kawasan TN Babul.			terhadap kelestarian kawasan TN Babul. - <i>Stakeholder</i> yang dapat terlibat dalam menyelesaikan permasalahan terkait keinginan peremajaan tegakan kemiri dalam kawasan TN Babul terdiri dari Balain TN Babul, masyarakat sekitar TN Babul, Dishutbun Maros, BP2KP Maros, Dinas Pertanian Maros, PNPM Mandiri, LSM, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga penelitian. Kemudian peran yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dapat berupa fungsi kontrol, bantuan fisik (bibit tanaman), bantuan teknis (teknik pengolahan lahan, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan), serta dukungan penelitian kebijakan pengelolaan TN Babul.		
Al hakim, Cepi , Fauzi, akhmad , Ekayani, Meti	Formulasi Alternatif Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Energi Panas Bumi di Kamojang, Jawa Barat dengan Analisis Multi Criteria Decision Making (MCDM), 2014	- Memilih alternatif kebijakan pengelolaan panas bumi (geothermal) di Kawasan Kamojang, Jawa Barat - Mengetahui nilai ekonomi langsung energi panas bumi di Pertamina Geothermal	- Ekonomi - Lingkungan - Sosial - Kelembagaan	- Analisis Ekonomi langsung Energi Panas Bumi - Analisis Depleksi (Panas bumi & Hutan) - Analisis Konflik - Analisis Stakeholder - Analisis Multi	- Pemilihan alternatif kebijakan pengelolaan sumberdaya energi panas bumi (Geothermal) di Kawasan Kamojang Jawa Barat dengan analisis MCDM menghasilkan urutan prioritas kebijakan yaitu : 1) Pengembangan dan pengelolaan panas bumi skala kecil, 2) Renegosiasi nilai jual energi panas bumi, 3) Kepastian waktu perijinan, 4) Perlindungan keanekaragaman hayati dan kewajiban konservasi air tanah, 5) pemanfaatan panas bumi secara langsung untuk wisata dan	Penelitian ini digunakan sebagai referensi penggunaan metode analisis Multi Criteria Decision Making	- Pada penelitian ini terdapat analisis yang berkaitan dengan panas bumi, yaitu analisis ekonomi langsung energi panas bumi dan analisis Depleksi

Nama	Judul Penelitian dan Tahun	Tujuan Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Manfaat Penelitian	Perbedaan Studi
		Energi (PGE) kawasan Kamojang - Mengetahui nilai depresiasi dan deplesi kawasan hutan PGE kawasan Kamojang - Mengetahui peran para pihak dan konflik yang terjadi - Mengetahui tentang pengelolaan panas bumi dan permasalahan yang terjadi.		Criteria Decision Making	agribisnis, 6) adanya participacing interest kepada BUMD dan BUMN, 7) Perizinan jasa lingkungan pemanfaatan kawasan Hutan (khususnya hutan konservasi), 8) pemberdayaan masyarakat, 9) Imlementasi UU Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, 10) Pendirian Pusat Penelitian dan Pengembangan Panas Bumi.		- Pada penelitian ini lokasi studi adalah pada kawasan yang terdapat panas bumi
Rani, Chair, Nessa, M. Natsir, Faizal, Ahma, Samawi, A. Farid	Aplikasi Metode Multycriteria Decision Making (MCDM) dengan Teknik Pembobotan dalam Mengidentifikasi dan Mendesain Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan	- Mengidentifikasi kondisi biofisik dan potensi sumberdaya alam pesisir calon kawasan konservasi perairan daerah, Kabupaten Luwu Utara dalam mendesain kawasan yang sesuai untuk KKKPD berdasarkan teknik	- Karakteristik bioekologi - Pesisir - Konservasi	- Analisis kesesuaian lahan - Analisis Multi Criteria Decision Making	- Hasil analisis multikriteria didapatkan 2 kawasan yang sesuai untuk peruntukan Zona inti, yaitu pada kawasan I dan kawasan III dengan total luasan 654,22 Ha. Untuk Zona perikanan berkelanjutan, Kawasan II dan Kawasan IV menjadi pilihan utama dengan total luasan sebesar 620,27 Ha. Sedangkan untuk Zona Pemanfaatan berada di Kawasan V dengan total luasan 480,66 Ha. Total luasan kawasan yaitu sebesar 1.755,15 Ha. - Kawasan konservasi perairan daerah Kab. Luwu Utara diarahkan untuk perlindungan ekosistem	Penelitian ini digunakan sebagai referensi penggunaan metode analisis Multi Criteria Decision Making	- Pada penelitian ini terdapat output yaitu mendesain kawasan konservasi perairan daerah di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Nama	Judul Penelitian dan Tahun	Tujuan Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Manfaat Penelitian	Perbedaan Studi
		<p>pembobotan dengan metode MCDM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi potensi dan arahan pemanfaatan calon kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir kabupaten Luwu Utara 			<p>pesisir (mangrove, padang lamun, dan terumbu karang) dan biota asosiasinya, khususnya perlindungan daerah feeding ground dari beberapa jenis penyu dan dugong.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arahan pemanfaatan untuk Zona Perikanan Berkelanjutan diarahkan untuk kegiatan budidaya rumput laut dan penangkapan dengan alat tangkap sero, jaring dan pancing. - Untuk Zona Pemanfaatan Umum, diarahkan untuk kegiatan edu-ecowisata, penelitian, dan alur pelayaran tradisional. Untuk zona lainnya dapat dilakukan kegiatan rehabilitasi ekosistem, khususnya ekosistem padang lamun dan terumbu karang. 		

2.10 Kerangka Teori

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan maka dapat dibuat kerangka teori yang terkait dengan teori-teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Kerangka teori secara jelas dapat dilihat pada *Gambar 2.1*.



Gambar 2. 1 Kerangka Teori Penelitian

“Halaman ini sengaja dikosongkan”